

**BENTUK-BENTUK PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUGIAN NEGARA
(Studi Kasus Pembangunan Konstruksi Dermaga)**

INTISARI

Oleh

Hendra Susanto¹ dan Nurhasan Ismail²

Persekongkolan dalam tender pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Sejalan dengan pengertian persekongkolan tender tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk lebih menekankan pengidentifikasian bentuk-bentuk persekongkolan dalam pengadaan jasa konstruksi khususnya konstruksi dermaga, serta untuk mengetahui dampak dari persekongkolan tersebut terhadap kerugian Negara.

Penelitian ini merupakan hasil studi kasus yang bersifat deskriptif dikarenakan menggambarkan proses terjadinya persekongkolan baik secara horizontal, vertikal maupun gabungan vertikal dan horizontal dalam suatu pengadaan jasa konstruksi pembangunan dermaga serta dampaknya terhadap kerugian negara yang terjadi. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sabang Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi dari para responden yang dilakukan dengan cara wawancara. Adapun responden yang di wawancara dalam penelitian ini adalah sebanyak 326 responden. Selain wawancara dengan para responden, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini juga didukung dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Semua data tersebut dianalisis dan dibahas untuk mendapat keyakinan yang memadai bagi peneliti dalam membuat kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persekongkolan tender dalam pengadaan jasa konstruksi dapat dilakukan oleh para pihak dalam bentuk persekongkolan vertikal dan horizontal. Namun persekongkolan vertikal tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak dibarengi dengan adanya usaha persekongkolan horizontal. Persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal jika hanya berjalan sendiri-sendiri saja maka tidak akan terjadi persekongkolan tender yang sempurna. Untuk menjadi sempurna maka gabungan persekongkolan baik secara horizontal maupun vertikal harus berjalan seiring dan seirama, dengan mengatur pihak-pihak pemilik pekerjaan dan para penyedia jasa konstruksinya. Namun demikian, persekongkolan tender dapat diminimalisir dengan memutus mata rantai persekongkolan yaitu dengan cara membuka akses yang sebesar-sebesarannya bagi para penyedia jasa, tidak diskriminatif, membangun sistem pengawasan internal yang kuat dan membuat *whistle blower system* untuk pencegahan dini persekongkolan tender.

Kata kunci: bentuk-bentuk persekongkolan, persekongkolan tender, dampak persekongkolan.

¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**FORMS OF CONSPIRACY IN THE PROCUREMENT OF CONSTRUCTION
PROJECT AND THE IMPACT ON FINANCIAL STATE LOSSES
(Case Study on Seaport Construction)**

ABSTRACT

By

Hendra Susanto¹ and Nurhasan Ismail²

Conspiracy comes from the word confederate. Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Article 1 (8) states that the collusion or conspiracy venture is a form of cooperation undertaken by businesses with other businesses with the intention of controlling the relevant market for the benefit of the perpetrator conspiring effort. Conspiracy in the tender can occur through an agreement, written or unwritten. Bid rigging include a range of behaviors that are spacious, among others, production or distribution activities of trade associations, pricing, and manipulation of the auction or collusion in tender (collusive tenders), which can occur through an agreement between businesses, between the owner of the work as well as between the two parties. The conspiracy in tender aims to limit other potential competitors to strive in the relevant market by determining the winning bidder. The conspiracy can occur at any stage of the tender process, from planning and manufacturing requirements by the executor or the tender committee, the adjustment tender documents, until the announcement of the tender.

This study aimed to identify the forms of collusion in procurement of construction services in particular the construction of the sea port and the impact of the conspiracy against the State losses.

From the results of this study concluded that collusion auction / tender in the procurement of construction services can be done by the parties at the vertical level. But the vertical conspiracy will not be able to run properly if it is not accompanied by any effort horizontal conspiracy.

The setting of the winner of the auction / tender should also be made in horizontal level in order to create conditions of auction smoothly. The way to do the horizontal conspiracy mostly by borrowing "*the company flag*".

Conspiracy in vertical and horizontal level if only done by their own way it self, there will be no perfect bid rigging. To be perfect, the conspiracy must be combined both horizontally and vertically in line and tune in, by arranging all the owners of the work and the construction services provider.

Keywords: *forms of conspiracy, bid rigging, conspiracy impact.*

¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta